

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dewan Tunda Usulan Rp69 M untuk Jalur Sepeda

JAKARTA- Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan anggaran pembuatan jalur sepeda pada 2020 sebesar Rp69,27 miliar. Usulan tersebut masuk dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dibahas bersama DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta kemarin. Sayangnya, usulan tersebut tidak disertai perencanaan yang matang.

Dalam rapat sejumlah anggota Komisi B bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta mencecar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Mereka mempertanyakan dana pembangunan jalur sepeda pada 2020 yang diusulkan Rp69,271 miliar. Angka tersebut naik 10 kali lipat lebih dari tahun sebelumnya dengan anggaran Rp4,49 miliar.

Sekretaris Komisi B Pandapotan Sinaga mempertanyakan urgensi keberadaan jalur sepeda di Ibu Kota. Apalagi, nilai anggaran yang diperlukan sangat besar. "Apakah ada ke-

butuhankhusus yang membuat pemerintah bahwa jalur itu diperlukan dari alokasi Rp4 miliar menjadi hampir Rp70 miliar?" kata Pandapotan.

Anggota Komisi B lainnya, Manuara Siahaan mempertanyakan masterplan atau rencana induk usulan Dinas Perhubungan terkait pembangunan jalur sepeda. Sayangnya, Syafrin tidak bisa menunjukkan masterplan yang diminta. Manuara akhirnya meminta pimpinan untuk menunda pengesahan usulan anggaran tersebut.

Mendengar hal tersebut, Pandapotan beserta pimpinan sepakat untuk menundanya. "Nanti dibahas selanjutnya yang lebih dalam dengan menunjukkan masterplannya," ujarnya.

Anggota Komisi B lainnya Gilbert Simanjuntak mengaku miris dengan usulan anggaran yang disampaikan Dinas Perhubungan. Menurut dia, dari 425 kegiatan yang diajukan dengan total anggaran Rp2,6 triliun, hanya 12 kegiatan yang

baru. Sementara sisanya 413 merupakan kegiatan yang sama seperti 2019.

Menurut Syafrin, pembangunan jalur sepeda jangan dilihat sebagai sesuatu hal yang mengurangi kapasitas jalan. Tetapi, harus dilihat dari satu kesatuan dalam konteks penataan angkutan umum secara masif di Jakarta. Menurutnya, membangun infrastruktur transportasi tanpa menyelesaikan persoalan mayor, yang terjadi adalah ada infrastruktur transportasi angkutan umum, tetapi penumpangnya tidak.

Syafrin mencontohkan, transportasi Transjakarta. Kapasitas angkutan massal itu sebenarnya adalah 2 juta penumpang per hari. Tapi, sampai saat ini jumlah penumpangnya baru mencapai 937.000 per orang. Artinya, penyelesaiannya tidak hanya di dalam pembangunan infrastruktur berupa penyediaan sarana, tetapi juga harus dari awal orang yang akan menuju ke stasiun maupun halte itu harus difasilitasi.

● bima setiyadi